

	News Title : Ekspor Minyak Sawit Tidak Termasuk Bursa Berjangka	
	Media Name : jabarekspres.com	Journalist : Fasya Rashif Mahran
	Publish Date : 29 June 2023	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 1,500,000
	Resources : Farid Amir (Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag)), Olvy Andrianita (Sekretaris Bappebti)	Ads Value : 500,000
	Section/Rubrication : Ekonomi Bisnis	Topic : Ekspor CPO

Ekspor Minyak Sawit Tidak Termasuk Bursa Berjangka

Fasya Rashif Mahran | Kamis, 29 Juni 2023, 2:00 PM
Ekonomi Bisnis



Foto: Antara

JABAR EKSPRES – Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Farid Amir, mengungkapkan bahwa ekspor minyak sawit atau crude palm oil (CPO) melalui bursa berjangka komoditi akan mengatur hanya CPO dengan kode HS 15111000 dan tidak mencakup produk turunannya.

Menurut Farid, keputusan ini diambil karena volume ekspor CPO atau minyak sawit tersebut tidak terlalu besar, sehingga implementasinya tidak akan menimbulkan gangguan yang signifikan.

"Selain itu, hanya Eksportir Terdaftar (ET) yang berhak melakukan ekspor, dengan syarat memiliki Hak Ekspor (HE) yang diperoleh melalui pemenuhan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan/atau dari pihak yang mengalihkan HE atas pemenuhan DMO," ujar Farid dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Farid menjelaskan bahwa tidak ada perubahan signifikan dalam proses bisnis kebijakan ekspor CPO atau minyak sawit melalui bursa berjangka.

Dalam kebijakan ini, terdapat satu langkah tambahan sebelum eksportir melakukan ekspor CPO, yaitu harus melakukan transaksi di bursa berjangka dan mendapatkan bukti pembelian CPO dari bursa. Bukti pembelian ini akan digunakan dalam proses penerbitan Persetujuan Ekspor (PE).

Sekretaris Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Olvy Andrianita, menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Bappebti tentang Petunjuk Teknis Perdagangan Pasar Fisik untuk Ekspor CPO akan mengatur tata kelola bursa CPO, lembaga kliring CPO, serta persyaratan izin untuk bursa CPO dan lembaga kliring CPO.

Peraturan tersebut juga akan mengatur prosedur perdagangan di bursa CPO, mekanisme pengawasan oleh Bappebti dan bursa CPO, serta penyelesaian sengketa dan keadaan force majeure.

Sementara itu, Peraturan Tata Tertib (PTT) untuk ekspor CPO melalui bursa berjangka akan mencakup ketentuan teknis yang lebih rinci, termasuk persyaratan dan prosedur penerimaan peserta penjual/pembeli, hak dan kewajiban peserta penjual/pembeli, biaya jaminan transaksi, mekanisme pengawasan, mekanisme penyerahan fisik CPO, dan keadaan force majeure.

"Dalam proses ini, ketiga kebijakan dan ketentuan teknis tersebut harus menyelaraskan dan saling mendukung, sehingga perlu mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan. Kebijakan ekspor CPO juga harus sejalan dengan kebijakan pemenuhan kebutuhan CPO di dalam negeri, agar tidak memberatkan pelaku usaha," kata Olvy.

Ekspor CPO melalui bursa berjangka diharapkan dapat menciptakan basis data CPO yang akurat dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32/1997 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 10/2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK).

Salah satu tujuan PBK adalah menciptakan mekanisme penetapan harga (price discovery) dan harga acuan (price reference) yang transparan. Bursa CPO yang ditunjuk oleh pemerintah harus dapat dipercaya baik di pasar domestik maupun internasional.

Biaya transaksi CPO di bursa juga harus kompetitif atau setidaknya sama dengan biaya transaksi CPO yang selama ini dilakukan oleh pelaku usaha Indonesia di bursa Malaysia.

Diharapkan bahwa kebijakan yang akan dilaksanakan dapat diimplementasikan dengan mempertimbangkan kontrak jangka panjang (long-term contract) dan mudah dalam pelaksanaannya. Selain itu, diperlukan pelatihan dan sosialisasi terkait prosedur dan mekanisme ekspor melalui bursa berjangka kepada pelaku usaha.